

**KINERJA ANGGARAN KEGIATAN EVALUASI SPIP
(SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH)
DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**AMIRA ADLIAH
NIM. 07011281823090**

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Juli 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

KINERJA ANGGARAN KEGIATAN EVALUASI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

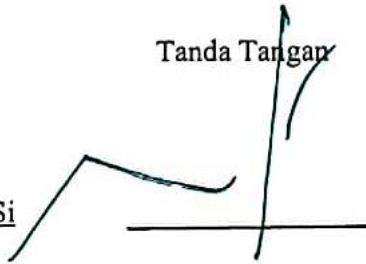
AMIRA ADLIAH
07011281823090

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



11/7.22

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



7/7.22

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

KINERJA ANGGARAN KEGIATAN EVALUASI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH)DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

Skripsi

Oleh :

Amira Adliah

07011281823090

Telah dipertahankan di depan penguji

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 27 Juli 2022

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Penguji :

1. Dr. Alamsyah, M.Si
NIP. 197808182009121002

2. Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012

Tanda Tangan



Mengetahui :

Dekan FISIP UNSRI

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. M. Nur Badhyanto, S.Sos, MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amira Adliah
NIM : 07011281823090
Tempat dan Tanggal Lahir : Lahat, 5 April 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Kinerja Anggaran Kegiatan Evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pegamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 11 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Amira Adliah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Hidup itu Bukan Soal Menemukan Diri Anda Sendiri,
Hidup itu Membuat Diri Anda Sendiri”**

-George Bernard Shaw-

Dengan rahmat Allah SWT, maka skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua Orangtua saya yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tiada henti untuk proses penyelesaian skripsi ini
2. Saudara-saudariku yang selalu memberikan dukungan
3. Sahabat-sahabatku serta rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018
4. Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan karena dengan segala rahmat dan ridho Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Skripsi ini berjudul “Kinerja Anggaran Kegiatan Evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua sebagai orang yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat. Terima kasih atas do'a, bantuan, dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini khususnya selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Sylvie Agustina, S.IP., M.Si selaku pembimbing Akademik saya.
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyo, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan selama penulisan usulan penelitian ini.
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama penulisan usulan penelitian ini.
7. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP UNSRI yang telah memberikan segala ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan
8. Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik Kampus Indralaya dan Palembang
9. Bapak Bambang Wirawan, S.E., M.M., Ak., CA., CGCAE selaku Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
10. Ibu Yune Roslaini, S.E., M.Si selaku Sekretaris di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Bapak Adi Baladika, S.H selaku pembimbing selama melakukan penelitian serta sebagai narahubung yang sudah mengurus Administrasi dan Konsultasi dari setiap proses penelitian.
12. Bapak dan Ibu Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018.
14. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan usulan penelitian ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini. Semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini dalam mencapai kesempurnaan. Semoga seluruh bantuan dan partisipasi mendapat kan balasan dari Allah Subhanahuwata'ala.

Palembang, Juli 2022

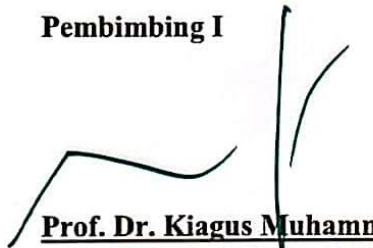
Amira Adliah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja anggaran kegiatan evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknis analisis data dalam penelitian ini ialah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja dari Mahsun berdasarkan enam dimensi yaitu : Masukan, Proses, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran kegiatan evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada tahun 2020 telah dilaksanakan, namun untuk pelaksanaannya dilakukan secara daring sehingga penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini memiliki sisa pagu anggaran yang banyak. Selain itu, adanya situasi pandemi Covid-19 juga menjadi penyebab dari permasalahan tersebut karena tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Saran yang direkomendasikan adalah meningkatkan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai evaluasi SPIP serta meningkatkan hubungan koordinasi bersama pihak yang terlibat. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar lebih pro aktif dalam menindaklanjuti kegiatan yang dilaksanakan agar manfaat dampak yang diberikan lebih maksimal sehingga penyerapan anggaran pun lebih baik.

Kata Kunci : Kinerja, Anggaran, Kegiatan, Evaluasi SPIP

Pembimbing I



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

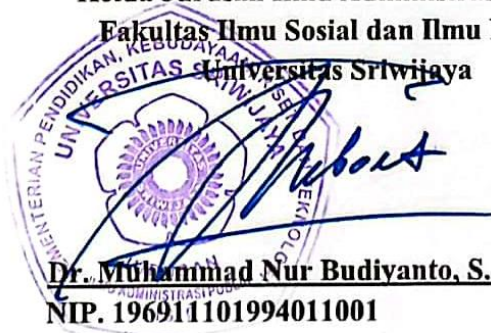
Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Juli 2022

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Universitas Sriwijaya

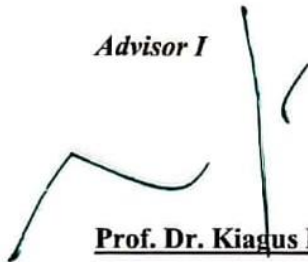
Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to discover how the performance of the SPIP (Government Internal Control System) evaluation activity budget is at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province in 2020. In this study, the method used was descriptive qualitative. Primary and secondary data were the data sources in this study. The data analysis technique in this study included data reduction, data display and conclusion drawing. This study used Mahsun's performance measurement theory based on six dimensions: Input, Process, Output, Outcome, Benefit and Impact. This study's result indicates that the performance of the SPIP (Government Internal Control System) evaluation activity budget in 2020 has been carried out. However, since the activity's implementation was carried out online, the budget absorption for the activity's implementation has a large remaining budget ceiling. In addition, the Covid-19 pandemic situation is also the cause of those problems as a result of inefficient activity implementation and the use of the budget, which affects the budget absorption. The recommended suggestion is to improve training or technical guidance regarding SPIP evaluation and enhance coordination relations with the parties involved. In order to optimize the advantages of the effects provided and improve the budget's absorption, the Regional Inspectorate of South Sumatra Province should be more proactive in following up the activity that is performed.

Keyword : Performance, Budget, Activities, SPIP Evaluation

Advisor I



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

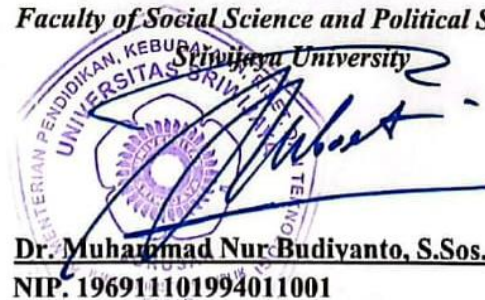
Advisor II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, July 2022

**Chairman of the state Administration Science Departement
Faculty of Social Science and Political Science**



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Keuangan Negara.....	10
2. Kinerja Anggaran.....	12
3. Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	17
E. Teori yang digunakan	21
C. Penelitian Terdahulu.....	23
D. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Definisi Konsep	30
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32

E. Informan Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	34
H. Jadwal Penelitian	36
I. Sistematika Penulisan	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	37
2. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	38
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan...	38
4. Sumber Daya Manusia dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	40
B. Kegiatan Evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	43
C. Hasil Penelitian.....	45
1. Dimensi Masukan (<i>Input</i>)	45
2. Dimensi Proses (<i>Process</i>)	53
3. Dimensi Keluaran (<i>Output</i>)	63
4. Dimensi Hasil (<i>Outcome</i>)	67
5. Dimensi Manfaat (<i>Benefit</i>).....	71
6. Dimensi Dampak (<i>Impact</i>).....	76
D. Pembahasan	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN	xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2020.....	4
Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan dari Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Tahun 2020	6
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4. Fokus Penelitian	31
Tabel 5. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan dan Pangkat	41
Tabel 6. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 7. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	41
Tabel 8. Susunan Pegawai Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Analisis dan Temuan pada Dimensi Masukan.....	46
Tabel 10. Daftar Sumber Daya Manusia Kegiatan Evaluasi SPIP Tahun 2020.....	48
Tabel 11. Daftar Jumlah Kendaraan	52
Tabel 12. Daftar Sarana dan Prasarana.....	52
Tabel 13 Rekapitulasi Hasil Analisis dan Temuan pada Dimensi Proses	53
Tabel 14. Daftar SKPD.....	58
Tabel 15. Rekapitulasi Hasil dan Temuan pada Dimensi Keluaran	64
Tabel 16. Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Evaluasi SPIP Tahun 2020	66
Table 17. Rekapitulasi Hasil Analisis dan Temuan pada Dimensi Manfaat	72
Tabel 18. Rekapitulasi Hasil Analisis dan Temuan pada Dimensi Dampak.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	29
Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah.....	42
Gambar 3. SOP Perencanaan Anggaran	54
Gambar 4. Persentase perangkat daerah yang telah mengimplementasikan SPI Tahun 2020	69

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	: Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
LKjiP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PAK	: Pembantu Administrasi Kegiatan
PPUPD	: Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
RENSTRA	: Rencana Strategis
RENJA	: Rencana Kerja
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
WFH	: <i>Work From Home</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
- Lampiran 2. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4. Surat Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi
- Lampiran 6. Kartu Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8. Kartu Perbaikan Ujian Skripsi
- Lampiran 9. Pedoman Wawancara
- Lampiran 10. Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 11. Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Dari beberapa tahun silam, isu pembangunan berkelanjutan atau sering kita dengar dengan istilah SDGs (*Sustainable Development Goals*) menjadi sorotan dari berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. SDGs merupakan bentuk komitmen yang diberikan dalam agenda pembangunan global yang disetujui dan disepakati oleh 194 negara di dunia termasuk Indonesia. Adanya agenda SDGs inilah diharapkan mampu menanggapi tuntutan para pemimpin dunia untuk mencegah segala bentuk kemiskinan, ketimpangan sosial serta perubahan iklim dalam bentuk respon secara langsung. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 17 tujuan yang masing-masing diantaranya memiliki tiga konsep utama yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi.

Perekonomian selalu mengalami pembaharuan-pembaharuan semakin berkembangnya zaman karena perekonomian tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Untuk mencapai perekonomian yang stabil dan berkelanjutan tentu pemerintah Indonesia menyadari hal itu harus didukung oleh salah satu sistem yakni keuangan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Seperti salah satu dari tujuan SDGs yang ke 16 yakni : Untuk merealisasikan target itulah, bentuk upaya yang dapat dilakukan salah satunya ialah dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparansi, efektif dan efisiensi. Hal tersebut sangat penting menjadi pedoman dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik terutama dalam pengelolaan keuangan.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur segala aspek penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep otonomi dan tugas pembantuan

untuk memajukan kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan mengutamakan asas yang terkandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu demokrasi, pemerataan, keadilan, kesempatan, disiplin, dan keragaman. daerah. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang otonom, berhak mengelola sendiri sumber keuangannya yang ada dalam APBD. Dengan adanya pelimpahan kekuasaan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, diharapkan mampu untuk mengalokasikan anggaran daerah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tersebut kemudian digunakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebijak mungkin untuk membiayai segala program kerja serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan anggaran. Pada organisasi sektor swasta maupun sektor publik, anggaran merupakan bagian yang terpenting untuk menjalankan segala kegiatan pada organisasi. Hal ini karena anggaran digunakan untuk membiayai dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari beberapa fungsi anggaran, salah satu fungsi anggaran dalam bidang sektor publik ialah selaku cara untuk melakukan penilaian kinerja. Hal yang terpenting dalam melakukan suatu penilaian kinerja yakni dilihat dari sejauh mana pencapaian target yang dilakukan serta seberapa tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran.

Anggaran adalah faktor yang sangat penting dalam sebuah perencanaan disuatu daerah dan sebagai alat pengendalian pada organisasi pemerintahan. Anggaran diartikan sebagai alat perencanaan memiliki makna bahwa ada sebuah target yang harus dicapai. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah pemerintah hasilkan dari sebuah target tersebut terhadap terhadap jumlah anggaran yang direalisasikan.

Sedangkan anggaran diartikan sebagai alat pengendalian bahwa anggaran tersebut dapat menjadi fungsi dari pengendalian pemerintah, dengan adanya penyusunan anggaran tersebut, maka proses kerja pemerintahan pun tersusun secara baik, sehingga dengan ini mampu memungkinkan pencapaian secara ekonomi, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta tujuan masing-masing organisasi dapat terwujud dengan sempurna.

Penilaian kinerja merupakan fungsi dari sebuah anggaran terutama dalam dunia sektor publik. Pencapaian dari sebuah anggaran serta hasil tingkat efisiensi pada pelaksanaan anggaran merupakan sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja anggaran. Pengukuran sebuah kinerja anggaran sangat penting dilakukan hal ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat pada Pasal 8 BAB II dijelaskan bahwa untuk penerapan anggaran berbasis kinerja, kementerian negara/lembaga melaksanakan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan setiap tahun berdasarkan sasaran dan standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai umpan balik bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk periode tahun selanjutnya.

Pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada semua aspek kehidupan, khususnya aspek ekonomi, sosial, dan politik. Karena berkembangnya peristiwa pandemi Covid-19 di Indonesia, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Peraturan ini sebagai respon atas ancaman terhadap perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara. Pergeseran anggaran dilakukan dalam kebijakan

penganggaran dan pembiayaan antar unit organisasi, fungsi, dan/atau program, sesuai Pasal 2 peraturan tersebut. Pasal 3 Perppu ini juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD dalam melaksanakan kebijakan di bidang keuangan daerah dalam rangka penanganan Covid-19. Peraturan inilah yang menjadi dasar dilakukannya rasionalisasi anggaran di Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dananya disalurkan untuk pembiayaan penanganan Covid-19.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menjalankan seluruh program maupun kegiatannya, sumber pendanaan berasal dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah badan pengawas penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Salah satu program kegiatan utama pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan ialah program reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi yang bertujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan memberantas segala tindakan-tindakan korupsi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Sumatera Selatan.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2018	Rp. 1.451.627.900	Rp. 841.409.459	57,96 %
2019	Rp. 3.358.443.800	Rp. 2.424.450.933	72,18 %
2020	Rp. 1.616.608.000	Rp. 1.192.517.586	73,76 %

Sumber : Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2020

Penejelasan mengenai tabel diatas yaitu penyerapan anggaran program reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tiga tahun anggaran selalu mengalami peningkatan namun belum termasuk kategori efektif karena belum mampu menyerap anggaran yang tersedia. Diantara tiga tahun anggaran tersebut, tahun 2018 hanya menyerap anggaran setengah dari target yaitu sebesar 57%. Namun, ditahun berikutnya mengalami peningkatan yang baik walaupun pada tahun 2019 mengalami fenomena pandemi Covid-19 dimana seluruh proses kegiatan sedikit terhambat. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020, anggaran yang tersedia menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Pasalnya, di tahun 2019 ini, di tahun 2019 terjadi peningkatan kasus yang setiap hari terjadi peningkatan kasus. Maka dari itu, tahun 2020 dapat berpotensi terus mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang tentunya berdampak pada perekonomian. Oleh sebab itu, diseluruh organisasi pemerintahan sepakat untuk melakukan *refocussing* anggaran atau pergeseran anggaran dalam rangka menyikapi pandemi Covid-19. Tetapi, walaupun anggaran telah dikurangi dari tahun sebelumnya, penyerapan anggaran pada program reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi pada tahun 2020 pun belum terserap dengan sempurna dan hanya tergolong kategori kurang efektif.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan dari Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Tahun 2020

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Evaluasi Kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemprov Sumsel dan Kab/Kota	Rp. 397.030.000	Rp. 257.057.500
2.	Evaluasi SPIP	Rp. 136.000.000	Rp. 15.700.000
3.	Evaluasi Kapabilitas APIP	Rp. 100.300.000	Rp. 93.435.800
4.	Reviu Laporan Kinerja	Rp. 33.220.000	Rp. 33.045.000
5.	Operasional Sapu Bersih Pungli	Rp. 502.548.000	Rp. 449.403.286
6.	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Rp. 101.500.000	Rp. 101.500.000
7.	Penilaian Internal Zona Integritas	Rp. 75.350.000	Rp. 49.930.000
8.	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Rp. 77.100.000	Rp. 73.796.600
9.	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Rp. 79.560.000	Rp. 71.030.000
10.	Evaluasi Pelayanan Publik	Rp. 45.100.000	Rp. 28.720.000
11.	Monitoring dan Evaluasi Penanganan <i>Whistle Blower System</i>	Rp. 50.000.000	Rp. 0
12.	Pengawasan Implementasi Perjanjian Kerjasama antara APH dan APIP	Rp. 18.900.000	Rp. 18.900.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan dari Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Tahun 2020

Tabel diatas merupakan data yang telah diolah oleh peneliti mengenai kegiatan-kegiatan pada program reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2020. Dari 12 kegiatan yang ada, hanya 5 kegiatan yang mencapai kategori efektif dan penyerapan anggaran yang baik. Terdapat satu kegiatan yang tidak berjalan sehingga anggarannya pun tidak terpakai. Kemudian, pada kegiatan Evaluasi SPIP hanya terealisasi sebesar 11,54% dari jumlah anggaran yang ada.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada salah satu kegiatan yang ada pada Program Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi yakni kegiatan Evaluasi SPIP yang dari perhitungan realisasi anggarannya tidak mencapai 50%. Dana yang

dianggarkan sejumlah Rp.136.000,000 namun penyerapannya hanya sejumlah Rp.15.700.000. Permasalahan penyerapan anggaran yang sangat sedikit pada pada kegiatan Evaluasi SPIP tahun 2020 salah satu penyebab utama ialah dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya segala kegiatan yang sebelumnya dapat dilakukan secara langsung.

Kajian mengenai kinerja anggaran pelaksanaan program maupun kegiatan sangat menarik bagi peneliti. Selain itu, penelitian sangat penting bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang kinerja anggaran pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi yang merupakan tugas utama dari Inspektorat itu sendiri. Penelitian ini sangat perlu dilakukan karena adanya pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi kinerja anggaran.

Tentunya, sebagian dari hasil riset penelitian sebelumnya dapat dihubungkan dengan Kinerja Anggaran Kegiatan Evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Namun berdasarkan hasil pembacaan literatur penulis pada penelitian sebelumnya tentang kinerja anggaran, dari sisi teori pengukuran kinerja menurut Mahsun (2013) belum ada. Selain itu, penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang membahas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, riset ini akan mengisi kekosongan riset sebelumnya dan menambah pengetahuan terutama dalam menganalisis kinerja anggaran dengan menggunakan teori tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, diperlukan pengamatan lebih lanjut mengenai kinerja anggaran program reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi terutama pada kegiatan Evaluasi SPIP di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu, peneliti memuat penelitian ini berjudul **“Kinerja Anggaran Kegiatan Evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Inspektorat Daerah Provinsi**

Sumatera Selatan Tahun 2020”, berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengetahui bagaimana kinerja Inspektorat Daerah Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi SPIP di tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah berlandaskan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas yakni bagaimana kinerja anggaran kegiatan evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Dilatarbelakangi rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini yaitu dalam rangka mengetahui kinerja anggaran kegiatan evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan guna menambah wawasan yang bermanfaat, sumbangan pemikiran, dan dapat menjadi salah satu bahan kajian di suatu kasus terutama dalam lingkungan Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai kinerja anggaran kegiatan di suatu instansi sekaligus sebagai sebagai alat bagi mereka yang ingin melakukan penelitian tambahan di bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan membagikan wawasan tentang kinerja anggaran pada salah satu program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bagi peneliti. Tak hanya bagi peneliti, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sebuah informasi bagi pihak Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan masukan yang membangun untuk memberikan gambaran positif agar kedepannya mampu memperbaiki kinerja anggaran agar dapat terlaksana lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraini, Yunita dan Hendra Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja : Penyusunan APBD secara Komprehensif*. Yogyakarta : STIM YKPN
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat
- Rudianto. 2009. *Penganggaran : Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Jakarta : Erlangga
- Mahsun, Muhammad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Murdayanti, Yunika. *Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. Bogor : IN MEDIA
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPF
- Tsauri, Sofyan. 2014. *Manajemen Kinerja*. Jember : STAIN Jember Press

Artikel Jurnal dan Hasil Penelitian

- Arafat, Zulfikar Ali., Aniek Wijayanti, Dewi Darmastuti. 2021. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Bantuan Sosial Covid-19 Provinsi DKI Jakarta*. Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Vol. 2. hlm. 82 - 96
- Fitriah, Nur Khalifah. 2021. *Analisis Kinerja Keuangan pada Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Menggunakan Konsep Value For Money*. UMS
- Hasby, Taufeni Taufik, Vince Ratnawati. 2018. *Analisis Peran Inspektorat dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti*. Jurnal Ekonomi. Vol. 26 No. 4
- Labi, Alfred. 2019. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 – 2015*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi. Vol. 5 No. 1
- Omposungga, Sensia Gibsi., Roy Valiant Salomo. 2019. *Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia*. JIAP Vol 5, No1.
- Palimbongan, Remy. 2019. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA. Vol.7 No.4
- Purwiyanti, Dwi. 2017. *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)*. Jurnal Katalogis. Vol. 5 No.3
- Rahmah, Zuraida, Syukriy Abdullah, 2017, *Analisis Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol. 3 No.2.
- Sucitra, Tasha Widya Suc., Iyeh Supriatna. 2020. *Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dan Implikasinya pada Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut)*. Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung.
- Tantri, Sakina Nusarifa., Putri Irmawati. 2018. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol 1 No 1 Hal 27-37

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PP No. 34 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP

Peraturan Keputusan Kepala BPKP RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dokumen Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Kerja Tahun Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Rujukan Internet

BPKP. 2022. “*Sekilas SPIP*”. (<http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/sekilas-spip.bpkp>) (Diakses 28 Januari 2022)

Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. 2020. “*Manfaat Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*”. (<https://itjen.pu.go.id/manfaat-Evaluasi-Penyelenggaraan-SPIP>) (Diakses 28 Januari 2022)

Kemenkumham. 2021. “*Reformasi Birokrasi*”. (<http://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/reformasi-birokrasi>) (Diakses 9 Januari 2022)